

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Buku

Apeldoorn, L.J. Van. "Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir." Bandung: PT Revika Aditama, 2006.

Black, Henry Campbell. "Black's Law Dictionary." USA: West Publishing Co, St. Paul Minn, 1991.

Fuady, Munir. "Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hartini, Rahayu. "Hukum Kepailitan." Malang: UMPress, 2020.

Jaya, Bergas Prana. "Pengantar Ilmu Hukum." Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Jono. "Hukum Kepailitan." Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Kansil, Cst. "Kamus Istilah Hukum." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Mandiana, Sari. "Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum." Oleh UPH Kampus Surabaya. Surabaya, 2023.

Mandiana, Sari. "Bahan Ajar Ringkasan Metoda Penelitian." Surabaya: UPH Kampus Surabaya, 2023.

Radbruch, Gustav. "Tujuan Hukum." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012, 2012.

Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum." Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Rawls, John. "Teori Keadilan." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sanjaya, Umar Haris. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan." 28. Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.

Shubhan, Hadi. "Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan." 161. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

- Sjahdeini, Sutan Remy. "Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan." 12. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Tjitrosoedibio, Subekti dan R. "Kamus Hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973.
- Usman, Rachmadi. "Dimensi Hukum Kepailitan di Indoensia." Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Widjaja, Kartini Muljadi dan Gunawan. "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan." Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Yuhelson. "Hukum Kepailitan di Indonesia." Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Jurnal

- Anisah, Siti. "Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor melalui Actio Pauliana." Jurnal Hukum 2, 2009
- Efy Yulistyowati Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani. "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis." Jurnal Dinamika Sosial Budaya 19, 2017
- Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Jurnal Konstruksi Hukum 3,no 1, 2022
- Handayani, Ainurnisa. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU." Varia Hukum 3, 2021
- Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayara Utang (PKPU)." Jurnal Hukum dan Peradilan, 2015
- Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Konsumen dalam Kepailitan." Jurnal.dpr.go.id 8, 2017
- Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group)
- Sembiring, J.,Saidin, O.K., & Siregar, M. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria A Fatima Pekanbaru.

Soeharto, Rachmat “Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi,” *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 No.1 (2019):2.

Yulaini, Tomi Suryo Utomo, R. Murjiyanto. “Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 2, 2019

Artikel

Hanif, Rifqani Nur Fauziah. “Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit dalam Bidang Hukum Kekayaan.” *Artikel DJKN*, 2015 (diakses September 13, 2023)

Internet

Advocates, Burs. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 3 Januari 2023. <https://bursadvocates.com/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/>. (diakses September 15, 2023)

Annizar, Baihaqi. Pengurus KSP Jateng Mandiri bisa Disandera Jika Tak Kooperatif. 29 Mei 2020. <https://jatengtoday.com/pengurus-ksp-jateng-mandiri-bisa-disandera-jika-tak-kooperatif/>.(diakses Oktober 11, 2023)

Antonius, Gunawan. Persekutuan Perdata Doni Budiono dan Rekan. 14 Juni 2023. <https://pdb-lawfirm.id/dampak-hukum-penolakan-proposal-perdamaian-debitur-oleh-kreditor-dalam-pkpu/> (diakses Agustus 7, 2023).

Arthaluhur, Made Wahyu. Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap. 24 Mei 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120/>. (diakses September 15, 2023)

Heriani, Fitri Novia. Memahami Seluk Beluk Proposal Perdamaian dalam PKPU dan Pailit. 19 Maret 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-seluk-beluk-proposal-perdamaian-dalam-pkpu-dan-pailit/> (diakses Oktober 9, 2023)

Kuasa Hukum Apresiasi Jaksa Tuntut Halim 13 Tahun Penjara. 24 Januari 2019. <https://www.mcwnews.com/read/2019/01/24/3195/kuasa-hukum-apresiasi-jaksa-tuntut-halim-13-tahun-penjara.html>. (diakses Oktober 9, 2023)

Okta, Dwifa. KSP Jateng Mandiri yang Pailit akan Diancam Gijzeling. 29 Mei 2020. <https://mitrapost.com/2020/05/29/ksp-jateng-mandiri-yang-pailit-akan-dianjam-gijzeling/>. (diakses Oktober 11, 2023)

Tim Hukumonline.com, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. (diakses September 5, 2023)

Wahyuni, Willa. Perbedaan Pailit dan Bangkrut. 29 Juni 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pailit-dan-bangkrut-1t62bc216145909/>. (diakses September 5, 2023)

Wijaya, Royce. Eks Ketua KSP Jateng Mandiri diminta Tanggung Jawab. 22 Januari 2018.
<https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-0436642/eks-ketua-ksp-jateng-mandiri-diminta-tanggung-jawab>. (diakses Oktober 2, 2023)

